

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Termasuk UndangUndang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimiyati, H. Harun, A. Budiono, & H. S. Disemadi, 2021, *Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo*. Macedonian Journal of Medical Sciences.
- Ahmad Redi, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abrar Saleng, 2024, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- Ahyuni Yunus, 2017, *Perjanjian Perbankan keterpaksaan kreditur dan ketidak berdayaan debitur*, Makassar:Pustaka refleksi.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia* , Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- _____, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- _____. 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

- Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Aisya Tjahja Rahmadewi, 2020, *Resource curse ketika korupsi mengubah kekayaan alam menjadi kutukan*, Semarang: UNDIP.
- Budiono, H., 2006, *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia-hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP, Cet-V*, Jakarta: Kencana.
- Bhorat, H., et al., 2017. *Betrayal of the promise: how South Africa is being stolen*. State Capacity Research Project.
- Bruggink J.J.H, 1996, *Refleksi Tentang Hukum (Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Dardji Darmohardjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dellyana Shant, 2011, *Konsep Penegakan Hukum*, Cetakan ke 12, Jakarta: Liberty.
- Dian Nova Fillia, 2011, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UII.
- Elli Louka, 2006, *International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge, United Kingdom: University Press.
- Emerson Yunto, dkk., 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Korupsi*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika.

- Eva Achjani zulfa, 2008, *Ketika jaman meninggalkan hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Firman Wijaya, 2008, *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penaku.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Howard Zehr & Ali Gohar, 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.P. Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Indriyanto Seno Adji, 2010, *Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*, Bandung: AAPSI.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James K. Feiblemen, 1985, *Justice, Law and Culture*, Dordrecht-the Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
- Jasim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Joseph F. Castrilli, 1999, *Enviromental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal and Regulatory Requirement*.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- K. Bartens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.

- Komariah E. Sapardjaja, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 1997, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurniadi, Y. 2011. *Dampak masif korupsi*, Jakarta: Kemendikbud.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- Lukmanul Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: Setara Press.
- La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, SIGn, Makassar: Sign.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law.
- Manuel G. Velasques, 2005, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus, (Alih Bahasa Ana Purwaningsih et al)*, Yogyakarta: Andi.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: STIH IBLAM.
- Muzadi, 2004, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2004, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Semarang: FH UNDIP.
- Masdar Farid Mas'udi, 2002, *Korupsi dalam Perspektif Budaya dan Syari'at Islam*, Jakarta: Aksara Foundation.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaaf)*, Bandung: Refika Aditama.

- Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implimentasi Hukum Pidana Sebagai Isntrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.
- M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Metha, I.K., 2014, *Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Bali: Udayana University Press.
- Nasruddin Anshoriy, 2010, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan* Yogyakarta: LKIS.
- Ouzounov, N. A. 2003. *Facing the challenge: corruption, state capture and the role of multinational business*. Marshall L: Rev. 37
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika.
- , 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum; Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif*, Surabaya: Unair.
- , 2010, *Hukum Adminitrasi sebagai instrument hukum untuk mewejudkan good governance*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Poerwadarminta, W. J. S., 2006, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Philippe Nonet, 2008, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- R. Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Rommelink, 2014, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ridwan, Dimiyati Khudzaifah, dan Absori, 2009, *Relasi Hukum Dan Moral Sebuah Potret Antar Mazhab Dan Konteks Ke-Indonesiaan*, in Prosiding Konferensi Nasional Ke- 3 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM).
- Romli Atmasasmita, 2008, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi. Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi, terjemahan Hermoyo*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2006 *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Nuansa Cipta warna
- Salim HS., 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Salim HS dan Erlis Septiani Nurbani, 2013, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soentandyo Wingyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukandarrumidi, 2010, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Syaiful Bachri. 2010. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Total Media.
- Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin Nawi, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2010, *Maladministrasi dalam konteks kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan, tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan (dalam buku hukum hukum administrasi dan good governance)*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Tarigan, A. 2013, *Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- _____, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusa Media.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, *kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Umam, A. Khoirul, 2014, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Antikorupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STP Press.
- Wayne Morrison, 1998, *Iurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism*, London: Cavendish Publishing Ltd.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 5 Nomor 3 Desember, Tahun 2016.
- A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimyati, H. Harun, A. Budiono, & H. S. Disemadi, *Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo*. Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(E), Tahun 2021.

- Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3 Tahun 2021.
- Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, and Rizna Khoirul Hidayati, '*Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia*', Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3. Nomor 1 Tahun 2023.
- Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- Citranu, 2020, *Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana*, Satya Dharma J. Ilmu Hukum., Vol. 3, Nomor 2.
- D. D. Satriawan, 2021, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Esensi Huk., Vol. 3, Nomor 2, tahun 2021.
- D. R. S. H. I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, 2002, *Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, J. Kertha Semaya, Vol. 10, Nomor 8.
- Dewi Setyowati, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Journal Pandecta, Vol. 15, Nomor 1, June 2020
- Eddy, O.S Hiariej, *Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality*, Korean Legislation Research Institute Asia Law Review Vol.2, Nomor 2 December 2005
- Edy Kastro, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim*," Artikel Hukum, Edisi Nomor XL Tahun XXXI, Maret 2019.
- Emirzal, et al., *State capture, grand corruption, petty corruption dan hubungannya dengan investasi di Indonesia*, Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol 9, Nomor 2, Tahun 2023.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, *Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kriminalisasi*, Bina Hukum Lingkungan, volume 5, nomor 2, Februari 2021.
- Gilang Izzudin Amrullah, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, Volume II Nomor 4.

- Handbook on Restorative Criminal Justice Handbook Series, 2006, *Justice Programmes*, New York United Nations.
- Herman, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Faculty of Law, Halu Oleo University, Volume 2 Issue 1, March 2018.
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. 2000, *Seize the state, seize the day: state capture, corruption, and influence in transition*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444>.
- Herman, dkk., “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin*,” Halu Oleo Legal Research, Vol. 4, Nomor 2 Tahun 2022.
- Husen Zuada, Nadhira Afadlia, M. Kafrawi, dan Moh. Nufta, *Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif Elite Capture*” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2023.
- Ito Dwi Kurniawan, *Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Nomor 1 Vol. 6 Tahun 2023.
- James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Bershire: Open University Press, Mc Graw-Hill Education.
- J. Woźniak, K. Pactwa, M. Szcześniewicz, and D. Ciapka, 2022, *Declaration of the Sustainable Development Goals of Mining Companies and the Effect of Their Activities in Selected Areas*, *Sustain.*, Vol. 14, Nomor 24.
- La Ode Maulidin, *Analisis Putusan MK dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010*, *Jurnal Konstitusi Widyagama*, Volume IV Nomor1.
- Laura Sharendova Gunawan, *Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023.
- Mahfud, MD. *Aspek Hukum Negara Dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), Tahun 2015.
- May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, Nomor 1, Tahun 2016.
- Mansari & Maulana, R., *Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian*. *Jurnal Yudisial*, 11(1). Tahun 2018.

- Mumu Muhajir, Maria S. W. Sumardjono, Timer Manurung, dan Julius Ferdinand, *Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, Nomor 2-2, Desember 2019.
- Nicodemus Wisnu Pratama dan Ismunarno, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen)*, Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 8, Nomor 1 Tahun 2019.
- Oheo K.Haris, *good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 No 1, Januari 2015.
- Oley & Adi, *Vulnerabilities of Indonesia âs Extractive Industry to Illicit Financial Flows. Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), Tahun 2018.
- R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang* , Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
- R. P. Samad, A. M. Y. Wahid, and H. Halim, 2021, *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, Al-Ishlah J. Ilm. Huk., Vol. 24, Nomor 1.
- R. Halimatu Hira, Y. Savira, and Y. Tresia, 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Suap di bidang pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, J. Anti Korupsi, Vol. 3, Nomor 2.
- Roberts, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Ensiklopedia Of Jurnal, Vol. 5 Nomor 4 Edisi 1 Juli 2023.
- Satria, H. *Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan*. Jurnal Yudisial, 13, Nomor 2. Tahun 2020.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009*, , Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widiyanti, A. *Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang*

Pertambangan dan Minerba, Prosiding Ilmu Hukum, 7(1), Tahun 2021.

Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2005.

C. Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 *tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang Peradilan Tata Usaha*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* 2001 *tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *tentang Administrasi Pemerintahan*.